

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia
2000, Vol. 15, No. 2, 164 - 178

PENGUJIAN DAN PEMILIHAN MODEL INFLASI DENGAN NON NESTED TEST STUDI KASUS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 1969-1997

Anang Sukendar
Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Pengendalian inflasi (anti inflation policy) oleh Rezim Orde Baru digunakan sebagai suatu senjata politik untuk menunjukkan performa perekonomian Indonesia dengan berusaha menekan angka inflasi serendah mungkin dibawah dua digit. Setiap ledakan inflasi selalu diikuti dengan kebijaksanaan yang tepat dan efektif. Tulisan ini mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indoensia dan memperbandingkan serta memilih model mana yang lebih tepat, yaitu antara model inflasi Krishan G. Saini dan model inflasi Vitaliano, untuk menerangkan perilaku inflasi di Indonesia kurun waktu 1969-1997 dengan menggunakan pengujian non nested test yang terdiri dari The Discrimination Approach dan The Discerning Approach.

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi adalah merupakan salah satu asas pembangunan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam trilogi pembangunan karena merupakan prasyarat yang penting bagi kelancaran serta berhasilnya pembangunan ekonomi, khususnya dalam menciptakan iklim ekonomi yang mampu meningkatkan gairah masyarakat untuk menabung dan mendorong kegiatan investasi. Selain daripada itu kestabilan ekonomi akan meningkatkan daya saing ekspor serta produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor serta mengurangi penggunaan dana yang spekulatif, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaannya bagi tujuan yang produktif. Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang, yang akan menekan tabungan dan investasi serta dapat menghambat usaha peningkatan ekspor.

Bagi Indonesia dalam upaya membangun kembali perekonomiannya, tingkat inflasi yang

tinggi harus dihindari agar supaya momentum pembangunan yang sehat dan kegairahan dunia usaha yang berada pada tingkat yang tinggi tetap dapat terpelihara. Namun kesemuanya itu tidaklah mudah dan memerlukan kehati-hatian yang mendalam. Informasi mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan kenaikan laju inflasi sangat diperlukan sebelum pemerintah mengambil kebijaksanaan yang tepat untuk menekan laju inflasi yang berlebihan. Bahkan sejak Orde Baru mengambil alih kekuasaan, pemerintah menerapkan kebijaksanaan anti inflasi (*anti inflation policy*) dalam berusaha menekan tingkat inflasi agar tidak lebih dari dua digit (*double digit inflation*).

Perbedaan paling jelas antara Orde Lama dan Orde Baru terlihat dalam pembangunan di bidang moneter dan keuangan. Rezim Orba mempunyai komitmen yang jelas pada pengendalian inflasi dengan penanganan yang tepat dan efektif dan telah membuat reputasi yang meyakinkan dalam pengendalian ekonomi makro yang kokoh secara mendasar dimana setiap ledakan inflasi diikuti oleh usaha perbaikan.

Dalam usaha untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia maka harus dipikirkan kebijaksanaan yang dapat menekan tingkat inflasi dan menciptakan stabilitas moneter yang merupakan persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju inflasi, maka kebijaksanaan yang lebih tepat untuk mencapai laju inflasi rendah dapat dirumuskan. Oleh karena itu implementasi suatu kebijaksanaan pengendalian harga haruslah merupakan koordinasi antara kebijaksanaan moneter, fiskal dan kebijaksanaan pembangunan lainnya (sektor riil).

PENGETERIAN INFLASI.

Di dalam teori ekonomi cukup banyak definisi atau pengertian mengenai inflasi. Definisi inflasi yang sering digunakan pada tingkat-tingkat awal setelah perang dunia kedua menurut **A.P. Lehner** antara lain: inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Anton Hermanto Gunawan, 1991:1). Kelebihan permintaan ini dapat diartikan sebagai berlebihnya tingkat pengeluaran (*level of spending*), untuk komoditi akhir dibanding tingkat output maksimal yang dapat dicapai dalam jangka panjang, dengan sumber-sumber produksi tertentu.

Definisi menurut **F.W. Paish** adalah *inflation, money incomes are being inflated related to real potensial Gross National Product (GNP)*, atau pendapatan nominal meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peningkatan arus barang dan jasa yang dibeli (pendapatan nasional riil) (Anton H. Gunawan, 1991:2).

Sedangkan Nopirin mengemukakan bahwa inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum yang berlaku terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi ke-

naikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukan merupakan inflasi (Nopirin, 1992:25).

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan harga dari barang tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga-harga barang lainnya. Kenaikan harga secara umum tetapi hanya bersifat musiman saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi merupakan suatu proses yang dinamis. Adanya inflasi mengesankan bahwa tingkat harga dan variabel-variabel lainnya secara sistematis dan berkesinambungan telah berada diluar keseimbangan (Thomas F. Denburg, 1986:315)

Kamerschen, mengatakan bahwa *"inflation represent a persitent rise in the average level of prices which is not matched by a proportinate increase in the level of the quality of good and sevices consumed"*. Jadi inflasi menggambarkan kenaikan tingkat harga rata-rata yang tidak diimbangi dengan kenaikan yang proporsional dari kualitas barang dan jasa yang dikonsumsi (David R. Kamerschen, 1984: 362).

Sementara itu **Ackley** (1978) mendefinisikan inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi (Iwardono, 1989:162).

Definisi diatas sejalan dengan definisi **Vinieris** dan **Sebold** (1977), yang menyatakan bahwa inflasi adalah *"a sutained tendency for the general level of prices to rise over time"* (Y.P. Vinieris dan F.D. Sebold, 1977:603).

Beberapa pengertian yang patut digaris bawahi dalam definisi tersebut adalah mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. *Tendency/kecenderungan* harga-harga untuk meningkat, artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penu-

runan harga tetap menunjukkan kecenderungan untuk meningkat.

2. *Sustained*. Peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
3. *General level of prices*. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya harga dari satu macam barang saja.

INDIKATOR INFLASI

Ada beberapa indikator yang biasa dipergunakan oleh para ahli ekonomi untuk menggambarkan terjadinya inflasi. Diantaranya adalah Indeks Biaya Hidup (*cost of living*), Indeks Harga Konsumen (*consumer prices index*), Indeks Implisit Product Domestic Bruto (GDP deflator), atau Indeks Harga Perdagangan Besar (*whole sale prices index*). Masing-masing ukuran tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan serta sangat tergantung pada tujuan pemakaiannya. Bila dimaksudkan untuk penetapan upah buruh riil maka lebih tepat digunakan Indeks Biaya hidup (IBH) atau Indeks Harga Konsumen (IHK). Sedangkan bila dimaksudkan untuk pembuatan kontrak kerja dan penyesuaian harga bagi kontrak yang dilakukan oleh kontraktor besar, biasanya digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPS). GDP deflator yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan indeks yang lain, sebenarnya mencerminkan perkembangan tingkat harga umum.

Angka inflasi dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur perekonomian secara umum, karena dari angka inflasi ini tercermin kondisi stabilitas perekonomian suatu negara. Angka laju inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perekonomian mengalami gangguan, baik berupa ekspor yang menurun karena penurunan daya saing, menurunnya tabungan dan investasi maupun gangguan lainnya.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah harus cepat tanggap dalam menentukan kebijaksanaan yang akan membawa kembali laju inflasi pada tingkat yang wajar.

Selama periode penelitian yaitu antara tahun 1969-1997, pengukuran laju inflasi di Indonesia didasarkan pada Indeks Biaya Hidup/IBH (*cost of living*) di Jakarta dan Indeks Harga Konsumen Nasional (IHK).

IBH ini dihitung berdasarkan pengamatan perkembangan harga 62 macam barang dan jasa di Jakarta dengan suatu timbangan (*weight*) yang telah ditetapkan berdasarkan hasil survey anggaran rumah tangga di kalangan buruh atau pekerja industri pada tahun 1957-1958. Penggunaan IBH ini sebagai indikator inflasi di Indonesia hanya bertahan hingga tahun 1979, karena ada beberapa hal yang dimana perhitungan dengan IBH ini diragukan ketepatannya. Oleh karena itu semenjak April 1979 dipergunakan hasil survei biaya hidup pada tahun 1977-1978 di 17 ibukota propinsi di Indonesia, sebagai dasar perhitungan IHK nasional. IHK nasional mencakup jumlah barang dan jasa yang lebih luas yaitu sekitar 115-150 jenis barang dan jasa antar ibukota propinsi, dengan survei yang tersebar di 17 ibukota propinsi di Indonesia. Akan tetapi semenjak April 1990, IHK yang digunakan diperbaiki dengan meliputi 220 komoditas barang dan jasa yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup di ibukota 27 propinsi dengan tahun dasar 1988/1989. Perubahan IHK dari tahun ke tahun menunjukkan besarnya laju inflasi.

IHK Indonesia merupakan hasil perhitungan dari IHK masing-masing ibukota propinsi yang ditimbang dari banyaknya runah tangga di kota yang bersangkutan, sedangkan sistematika pengolahannya disusun dalam beberapa kelompok dan sub kelompok, yaitu kelompok makanan, sandang, perumahan dan aneka barang dan jasa.

Untuk menghitung IHK ini dipergunakan rumus yang secara resmi dipakai oleh Biro

Pusat Statistik (BPS), yaitu rumus Laspeyres yang dimodifikasi yaitu (BPS, 1993:2):

$$IHK = \frac{\sum P_n \cdot P_{n-1} \cdot Q_0}{\sum P_0 \cdot Q_0}$$

dimana

- I = IHK bulan ke-n
- P_n = harga pada bulan ke-n
- P_{n-1} = nilai konsumsi pada bulan ke-n
- P₀.Q₀ = nilai konsumsi pada tahun dasar.

Berdasarkan angka IHK, akan dapat dihitung besarnya laju inflasi dengan menggunakan rumus :

$$I_t = \frac{I_{hkt} - I_{HKt-1}}{I_{HKt-1}} \times 100$$

Besarnya inflasi ditunjukkan dengan naiknya IHK, sedangkan bila IHK mengalami penurunan berarti terjadi deflasi.

JENIS-JENIS INFLASI

Jenis inflasi dapat dipisahkan menjadi tiga macam berdasarkan pada: (Boediono,1982:97)

1. Asal usulnya

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)
- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

2. Intensitasnya.

- a. Inflasi yang sifatnya lunak (*creeping inflation*)
- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*)
- c. Inflasi yang sifatnya tinggi (*hyper inflation*)

3. Sebab awalnya.

- a. Inflasi permintaan (*demand pull inflation*)

- b. Inflasi penawaran (*supply side theories of inflation/cost push inflation*)
- c. Inflasi campuran (*mixed inflation*)

DAMPAK INFLASI DALAM PEREKONOMIAN

Seberapa jauh dampak inflasi dalam perekonomian sangat tergantung dari tingkat keparahan inflasi tersebut. Seringkali kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi mempunyai pengaruh positif, terutama terhadap iklim investasi karena kenaikan harga pada dasarnya merupakan insentif bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan produksinya.

Secara teori laju inflasi yang terlalu rendah menunjukkan adanya kelesuan ekonomi, hal ini didasarkan atas asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak ke atas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan, maka tidak jarang, terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat. Pada gilirannya permintaan yang rendah akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Inilah yang pernah dirasakan Indonesia pada tahun 1985 dengan laju inflasi 4,3% setahun dengan laju pertumbuhan PDB hanya sebesar 2,53% atas dasar harga konstan 1983 (Sawidji Widiatmojo,1992:72-73).

Para ahli ekonomi moneter menyetujui bahwa efek positif itu dicapai secara maksimal dengan inflasi yang agak rendah, kira-kira 5-6% setahun (Bruce Glassburner dan Adityawan Chandra,1981:106).

Menurut Harvey (Jack harvey,1988:354-156) ada dua distorsi pokok dengan adanya inflasi yang tinggi, yaitu :

1. Distorsi internal. Inflasi akan mengakibatkan perubahan dalam pola distribusi pendapatan dan kekayaan dimana redistribusi pendapatan yang tidak seimbang.
2. Distorsi eksternal. Inflasi akan mempengaruhi kinerja perdagangan suatu negara yang tercermin dalam neraca perdagangannya.

Mengingat distorsi yang ditimbulkan oleh adanya inflasi, maka kebijaksanaan pengendalian inflasi akan memiliki manfaat ganda (multi benefit). Di satu sisi akan memperkuat daya beli masyarakat, terutama mereka yang mempunyai pendapatan relatif tetap, juga berfungsi untuk memperbaiki eksternal equilibrium (neraca perdagangan).

Hal senada juga dikemukakan oleh Nopirin (Nopirin, 1992:32) bahwa inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan (*equity effect*), alokasi faktor produksi dan produksi nasional (*efficiency dan output effect*).

PERKEMBANGAN INFLASI DI INDONESIA

Sejak pemerintahan Orde lama sampai memasuki Orde baru, perekonomian Indonesia mengalami berbagai perubahan. Yang paling mencolok ialah tingkat inflasi yang mencapai hiperinflasi pada masa Orde telah meninggalkan dampak yang sedemikian besarnya terhadap Indonesia sehingga berbagai aspek perekonomian dan kebijaksanaan dewasa ini tidaklah mudah dipahami tanpa melihat kembali pada permasalahan yang terdapat selama dan sesudah tahun yang penuh gejolak pada dasawarsa enam puluhan.

Pada masa Orde memang terlihat kebijaksanaan pemerintah Indonesia lebih ditekankan pada masalah-masalah politik. Hal ini bisa dipahami karena memang pada masa itu kondisi stabilitas politik, sebagai faktor penting untuk terwujudnya pembangunan ekonomi, belum tercapai. Karena terabaikannya masalah-masalah perekonomian, yang terjadi adalah laju pertumbuhan perekonomian Indonesia yang rendah, dimana selama periode 1962-1966 kurang dari 2%, lebih rendah dari kenaikan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita. Dalam neraca pembayaran juga terjadi defisit anggaran pemerintah yang sebagian besar ditutup oleh bank sentral dengan pencetakan uang baru. Hal inilah yang menimbulkan

hiperinflasi dan mencapai puncaknya pada tahun 1966 yang mencapai 635% (Anwar nasution, 1991:28)

Dapat dibayangkan bahwa situasi yang demikian amatlah sulit untuk melakukan usaha-usaha pembangunan yang sehat dan berkesinambungan. Menyadari hal ini, pemerintahan Orde dalam akhir tahun 1966 menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang memberi prioritas kearah pencapaian stabilitas moneter, yakni dengan melaksanakan program stabilisasi moneter, fiskal dan lalu lintas devisa.

Dalam kebijaksanaan fiskal, program stabilisasi terdiri dari kebijaksanaan anggaran belanja berimbang. Mengingat sukarnya dilakukan pengumpulan pajak dalam negeri dalam keadaan hiperinflasi, pemerintah pada permulaan program stabilisasi ekonomi terpaksa mempergunakan bantuan luar negeri bagi pembiayaan sebagian besar pengeluarannya. Dalam keadaan penerimaan padak yang rendah, sebagian bantuan luar negeri tersebut pada tahun 1967 digunakan juga untuk membiayai anggaran rutin, dan baru semenjak tahun 1968 bantuan luar negeri semata-mata digunakan bagi kegiatan pembangunan.

Disamping itu pemerintah juga mengurangi campur tangannya dalam bidang perekonomian dan memberi kesempatan pada pengusaha swasta untuk mengambil peranan yang lebih besar. Dalam hubungan ini, pengawasan devisa yang telah diberlakukan secara ketat selama ini, mulai akhir tahun 1966 secara berangsur-angsur dikurangi walaupun sistem yang dipergunakan masih melanjutkan sistem devisa multiple. Kelemahan sistem ini baru diatasi kemudian dalam tahun 1970-1971, yaitu dengan menetapkan sistem kurs devisa tunggal dan menghapuskan sistem pengawasan devisa. Semenjak itu Indonesia berubah menjadi salah satu negara yang menganut sistem devisa lalu lintas yang bebas.

Program stabilisasi serta langkah-langkah pelengkap tersebut berhasil mengurangi tingkat inflasi dari 635% di tahun 1966 menjadi

kurang dari 14% dalam tahun 1969. Dalam tahun 1971, inflasi tersebut telah menurun lagi menjadi sebesar 4,6%. Kesungguhan usaha pemerintah untuk melakukan secara efektif program stabilisasi tersebut telah berhasil menghilangkan kecemasan akan terus berlangsungnya inflasi dan dengan demikian dapat dibuat iklim yang tenang dan merangsang dalam melakukan pembangunan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan.

Suatu perekonomian yang kurang mengembirakan terjadi menjelang akhir Pelita I, yaitu munculnya kembali bahaya inflasi, yang terutama disebabkan oleh membaiknya pasaran komoditi internasional dalam tahun 1973/1974 serta terjadi peningkatan kredit perbankan. Dalam tahun 1974, tingkat inflasi meningkat menjadi 41% sementara pertumbuhan kredit perbankan dalam tahun tersebut telah mencapai 60%.

Untuk mengatasi laju inflasi yang demikian tinggi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan anti inflasi dalam bentuk Paket Anti Inflasi 9 April 1974 yang menyangkut segi pengelolaan permintaan dan penawaran (*demand dan supply management policy*). Di bidang pengelolaan permintaan, dilakukan beberapa kebijaksanaan perkreditan luar negeri, kebijaksanaan dana, kebijaksanaan modal dan kebijaksanaan anggaran belanja. Sedangkan dari segi penawaran dilakukan program cadangan nasional, kebijaksanaan perdagangan dalam negeri dan program pengadaan pangan. Sebagai hasil dari kebijaksanaan tersebut laju inflasi tahunan Indonesia secara bertahap turun drastis.

Pada perkembangan setelah pelita I dan memasuki Pelita II, secara umum telah mencapai sasarannya. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan PDB (harga konstan) yang rata-rata 7,2% setiap tahun. Pada tahun 1975 inflasi dapat ditekan menjadi 19,7% dan tahun 1977 menjadi 11,4% setahun.

Pada tahun 1979 inflasi kembali meningkat kembali menjadi 21,77% dan pada tahun

berikutnya menjadi 18%. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya harga minyak bumi, diambalnya tindakan devaluasi melalui Paket kebijaksanaan 15 Nopember 1978 (Knop 15), naiknya harga dasar pembelian beras, meningkatnya inflasi dunia dan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak. Guna mengatasi gejolak harga yang cukiup besar itu, diantaranya melalui pengendalian harga kebutuhan pokok (terutama beras) oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dan melalui stabilisasi berupa pengurangan penggunaan rekeningnya pada Bank Indonesia. Arndt dan Sundrum, berpendapat bahwa kebijaksanaan devaluasi Nopember 1978 membawa akibat terjadinya *cost push inflation* (H.W. Arndt, 1984:84).

Pada tahun 1985 laju inflasi Indonesia mencapai titik terendah, yakni dibawah 5%. Meskipun kenyataan ini menimbulkan tanggapan yang agak konvertibel oleh sementara ahli ekonomi, kerana rendahnya tingkat inflasi pada tahun tersebut mengindikasikan lesunya perekonomian Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Tingkat inflasi rata-rata yang ditunjukkan pada periode 1984-1992 adalah 7,36. Laju inflasi tersebut masih digolongkan pada tingkat inflasi moderat, yaitu berkisar dibawah batas psikologis (10%) atau dikatakan masih berada pada tingkat stabilitas relatif (Bruce Glassburner dan A. Chandra, 1984:91). Namun demikian pada tahun-tahun tertentu inflasi masih mengalami fluktuasi yang tajam, seperti pada tahun 1987 terjadi kenaikan 50% dari 5,8% pada tahun 1986 menjadi sebesar 9,2%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan indeks makanan yang erat kaitannya dengan berkurangnya produksi akibat kemarau panjang. Selain itu juga karena pengaruh devaluasi September 1986 yang masih terasa.

Sementara itu laju inflasi pada tahun 1990 tercatat sebagai laju inflasi tertinggi dalam periode 1985-1993, dengan angka sebesar 12,5%. Tingginya laju inflasi pada tahun ini disebabkan oleh kenaikan permintaan investasi dan konsumsi yang sangat cepat melebihi

kemampuan dalam negeri untuk memenuhinya. Akibatnya pada tahun ini perekonomian me-manas dan mengalami overheating (Andrianus Mooy, 1993).

Sebelum kesemuannya terjadi perang melawan inflasi sebenarnya telah ditempuh. Kebijakan uang telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Dampak kebijaksanaan tersebut tidak segera terlihat karena memerlukan tenggang waktu (time lag). Kebijakan uang ketat berangsur-angsur mampu mengerem laju inflasi sehingga pada tahun 1992 laju inflasi bisa ditekan sampai dibawah 5%. Dalam periode tahun 1994-1996 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 7,9% yang berarti lebih tinggi dari sasaran rata-rata pertumbuhan ekonomi selama Repelita VI. Memasuki tahun 1995, pelaksanaan pembangunan nasional mengalami masalah karena terjadi eksternal shock yaitu apresiasi Yen, disamping kecenderungan peningkatan inflasi yang merupakan sinyal adanya kesulitan ekonomi yang berawal pada tahun 1995. Laju inflasi juga mengalami penurunan seiring dengan penyelenggaraan kebijaksanaan moneter dan fiskal yang berhati-hati serta meningkatnya kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. Disisi eksternal, meskipun mengalami peningkatan defisit transaksi berjalan relatif cukup aman. Perkembangan yang cukup baik berlanjut hingga semester I 1997. Ekonomi Indonesia masih menunjukkan aktivitas yang tinggi yang diiringi dengan laju inflasi yang relatif rendah.

Memasuki semester II tahun 1977, perekonomian Indonesia mulai menghadapi tekanan yang berat sehubungan dengan mulai merebaknya krisis keuangan regional. Dalam keadaan pasar keuangan domestik yang telah terintegrasi dengan pasar keuangan regional maupun global, perekonomian menjadi sensitif terhadap berbagai perkembangan di negara lain. Tekanan inflasi pun menjadi semakin kuat, dimana laju inflasi kumulatif mencapai 11,5% yang merupakan laju inflasi tertinggi sejak 1983.

METODOLOGI PENELITIAN DAN KERANGKA KERJA ANALISIS

Studi ini menggunakan analisis regresi untuk pengolahan data. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen (tak bebas) terhadap satu atau lebih variabel independen (bebas) untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata populasi variabel dependen berdasarkan nilai tetap variabel independen (Gujarati, 1995:16).

Metode yang digunakan dalam membentuk fungsi regresi sampel adalah ordinary least square (OLS), atau metode kuadrat terkecil biasa. Metode regresi linier klasik (*Classical Linier Regression Model/CLRM* model) sebagai penaksir OLS dikatakan sebagai penaksir yang optimal jika memenuhi asumsi yang menyangkut data.

PEMBENTUKAN MODEL

1. Model inflasi Krishan G. Saini

Yang akan diuji dalam penelitian ini, pada dasarnya merupakan perluasan dari model penelitian inflasi moneter, yang dapat dituliskan sebagai berikut :

$$P = M - aY + bC$$

dimana P = laju pertumbuhan harga konsumen

M = laju pertumbuhan penawaran uang.

Y = laju pertumbuhan pendapatan riil.

C = perubahan biaya memgang uang yang diharapkan.

Model tersebut diturunkan dari fungsi permintaan uang yang didasarkan atas teori kuantitas uang moneter. Dimulai dari persamaan :

$$MV = PT$$

dimana M = penawaran uang

V = kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga

Y = pendapatan riil.

Maka dengan menspesifikasikan $V^{-1} = Y^a C^b$ akan diperoleh fungsi permintaan uang :

$$M = P Y^a C^b$$

(Proses ini secara lebih jelas dapat dilihat pada Robert C. Vogel, *The Dynamic Inflation in Latin America 1950-1969*, American Economic Review, No 1, Vol 64, 1974, hal 105).

Spesifikasi variabel yang dipergunakan untuk memperhitungkan biaya memegang uang telah menimbulkan kesulitan, karena di negara-negara yang belum maju pada umumnya tingkat bunga dianggap belum dapat mewakili biaya memegang uang. Ini didasarkan atas faktor-faktor kekakuan/rigiditas institusional dimana tingkat bunga cenderung dipertahankan dan dijaga pada tingkat yang terendah maupun pasar uang yang belum baik.

Untuk menghindari masalah tersebut Harberger telah menspesifikasikan model dengan menggunakan perbedaan laju inflasi pada masa yang lalu sebagai proxy biaya memegang uang (Krishan G. Saini, 1982:873). Dengan demikian model penentuan harga dapat ditulis sebagai berikut :

$$P = a_0 + a_1 M_t + a_2 Y_t + a_3 P'$$

dimana

$P' = (P_{t-1} - P_{t-2})$ sebagai proxy biaya memegang uang.

$P =$ tingkat harga.

Telah banyak dipercaya bahwa dalam perekonomian negara yang sedang berkembang berkembang, sumber utama inflasi adalah perilaku dari harga-harga barang impor. Untuk menguji validitas argumentasi ini, maka Saini telah memperluas model monetaris diatas dengan menambah variabel laju pertumbuhan harga impor sebagai variabel penjelas, sehingga persamaan yang akan diestimasi secara lengkap menjadi :

$$P = a_0 + a_1 M_t + a_2 Y_t + a_3 P' + a_4 P_m$$

dimana $P_m =$ laju pertumbuhan tingkat harga impor.

Perluasan model dengan menambahkan variabel harga impor dalam persamaan tersebut dengan alasan bahwa dalam perekonomian (khususnya perekonomian terbuka), perkembangan inflasi sepenuhnya dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor domestik dan eksternal. Komponen domestik dari inflasi sepenuhnya digambarkan dengan perkembangan variabel-variabel JUB, pendapatan dan ekspektasi terhadap harga, sedangkan komponen eksternal telah diwakili oleh perilaku harga impor.

2. Model inflasi Vitaliano

Model yang akan dipergunakan dalam model vitaliano merupakan pengembangan dari faktor-faktor yang diteliti oleh Vitaliano (1984) di Amerika Serikat (Donald Vitaliano, 1984, 22-23) yang akan dicoba untuk diterapkan untuk masalah inflasi di Indonesia.

Model ini berdasarkan pada teori produksi dimana inflasi merupakan hasil produksi atau output dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun fungsi produksi yang digunakan adalah semacam fungsi Cobb Douglass sebagai berikut (Iswardono, 1991:225).

$$Q = KA^\alpha B^\beta C^\delta \dots\dots\dots Z'$$

Dimana $Q =$ indeks harga

$A =$ JUB

$B =$ penawaran domestik

$C =$ harga di pasaran dunia

$Z =$ variabel lainnya.

Model semacam Cobb Douglass ini kemudian diperluas menjadi model inflasi sebagai berikut (Robert T. Kliman, 1995:14-24) :

$$I = b_0 + b_1 GM_t + b_2 GGDP + b_3 GGE + b_4 GPD$$

Dimana

$GMT =$ perubahan jumlah uang beredar.

- GGDP = perubahan Gross Domestic Product.
 GGE = perubahan pengeluaran pemerintah.
 GPD = perubahan penawaran domestik

PENGUJIAN HASIL REGRESI

Terdapat tiga kriteria pengujian untuk menilai apakah parameter-parameter estimate dari variabel yang dipergunakan dalam model yang benar-benar baik yaitu (Koutsoyannis, 1973 : 68):

1. kriteria teoritis (uji teoritik)
2. kriteria statistik (uji statistik) atau first order test.
3. Kriteria ekonometri (uji ekonometri) atau second order test.

PENGUJIAN NON NESTED TEST

Sedangkan untuk menyeleksi dan memperbandingkan antara dua model dalam penelitian ini akan menerapkan uji yang tidak disarangkan (non nested test), dimana menurut Harvey (Andrew Harvey, 1990, chap.5), ada dua pendekatan untuk menguji sebuah hipotesis non nested test yang meliputi: (Damodar Gujarati, 1990, hal. 487-493)

1. The discrimination approach, dimana bila ada dua atau lebih model maka untuk memilih model didasarkan atas kriteria goodness of fit.
2. The Discerning model, dimana dalam penelitian sebuah model, peneliti dapat mengambil beberapa informasi yang disediakan oleh model lain, meliputi Fttest, Davidson-MacKinnon J test dan JM test.

1. The Discrimination Approach.

Peneliti dapat memilih diantara dua atau lebih model berdasarkan kriteria goodness of fit. Sebagai contoh, peneliti dapat memperoleh nilai adjusted R^2 dari kedua model dan

memilih model dengan R^2 yang lebih tinggi. R^2 merupakan ukuran ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kebaikan suai (*goodness of fit*) garis regresi. Secara verbal R^2 mengukur proporsi (bagian) atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. Suatu sifat penting R^2 adalah bahwa nilai R^2 merupakan fungsi yang tidak pernah menurun (*noncreasing function*) dari banyaknya variabel yang menjelaskan yang ada dalam model, seiring dengan meningkatnya jumlah variabel yang menjelaskan. R^2 hampir-hampir selalu meningkat dan tidak pernah menurun. Adjusted R^2 berarti disesuaikan dengan derajat kebebasan (df) yang berkaitan.

Salah satu manfaat yang sering digunakan dari koefisien determinasi adalah kemampuan besaran statistik deskriptif ini untuk dipakai sebagai salah satu kriteria dalam memilih model terutama dikaitkan dengan "goodness of fit" dari model tersebut. Namun perlu dicatat disini bahwa agar suatu koefisien determinasi R^2 layak sebagai salah satu kriteria, dia harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (Kmenta, 1990:241-243; Pindyck dan Rubenfield, 1991:78-81; Kennedey, 1992:26-28; Ramanathan, 1992:124; Gujarati, 1995:265-266 dan Thomas, 1997:86-90)

1. Variabel tak bebas (dependent) dari model-model yang akan dipilih harus sama.
2. Jumlah data atau pengamatan (N) dari model-model yang akan dipilih harus sama.
3. Model-model yang akan dipilih harus lolos uji asumsi regresi linier klasik atau residunya stationer atau terhindar dari masalah regresi lancung.

Syarat pertama agar peneliti dapat membandingkan dua model dengan pendekatan koefisien determinasi R^2 adalah bahwa variabel tak bebas dari R^2 atau lebih model tersebut

harus sama, sedangkan variabel bebas dalam model tersebut dapat berbeda. Misalnya, suatu model konsumsi C tentunya tidak dapat dibandingkan dengan model tabungan (S), walaupun mungkin kedua variabel tersebut (C dan S) dipengaruhi oleh variabel-variabel yang sama, misalnya pendapatan (Y) dan suku bunga (I). Hal ini karena dalam model konsumsi, koefisien determinasinya mengukur proporsi variasi C yang mampu dijelaskan oleh variasi Y dan I. Disisi lain, dalam model tabungan, koefisien detrmisasi mengukur besarnya proporsi variasi S yang mampu dijelaskan oleh variasi Y dan I. Dengan demikian, koefisien R^2 tidak layak dipakai untuk membandingkan model-model yang memiliki variabel tak bebas yang berbeda (Kennedy, 1992:102).

Jumlah sampel atau pengamatan (N) perlu diperhatikan jika ingin menggunakan koefisien R^2 sebagai kriteria pemilihan model. Hal ini karena besar kecilnya N akan menentukan besar kecilnya TSS (total sum of squares). Dua model yang memiliki N yang tidak sama akan mengakibatkan rerata variabel tak bebas yang berbeda, sehingga TSS juga berbeda dan dengan sendirinya koefisien determinasinya juga tidak layak diperbandingkan.

Disamping itu dua model regresi lancung tentu saja tidak layak diperbandingkan walaupun mungkin kedua model tersebut memiliki variabel tak bebas dan jumlah pengamatan yang sama. Hal ini karena hasil estimasi regresi tersebut mungkin akan bias tau tidak efisien. Dengan demikian, sebelum membandingkan dua model, mislanya perlu diberlakukan terlebih dahulu uji diaognosis atau uji stationeritas.

Salah satu kelemahan dari The Discrimination Approach adalah bahwa pemeringkatan model secara sederhana hanya berdasarkan satu kriteria dan pemilihan model memberikan nilai tertinggi dari pemilihan pengukuran goodness of fit. Jelasnya, bahwa jika satu

model menonjol diantara model yang lain, dengan nilai R^2 tertinggi, ia harus tepat dengan data terbaik dan oleh karena itu menjadi "model yang benar".

2. The Discerning Approach

2.1. Davidson-Mackinnon J test

Uji yang dikemukakan oleh Davidson-Mackinnon dilakukan jika kita ingin melakukan seleksi antara model A dan model B. maka tahapan yang dilakukan adalah :

1. Estimasi model B dan kemudian akan diperoleh Y estimated yang dinotasikan dengan Yt^B .
2. Y estimated tadi digunakan sebagai regressor tambahan dalam model A, kemudian mengestinasasi model berikut : $Yt = a1 + a2X_2 + a3Yt^B + \mu$
3. Dengan menggunakan uji t, dilakukan uji hipotesa bahwa $a3=0$.
4. Jika hipotesa $a3=0$ tidak ditolak kita dapat menerima (tidak menolak) model A sebagai model yang benar. Sebaliknya bila hipotesis bahwa $a3=0$ ditolak, maka model A tidak dapat diterima sebagai model yang benar.
5. Kenudian hipotesanya dibalik. Pertama estimasi model A terlebih dahulu sehingga diperoleh Y taksiran, yaitu Yt^A . Kemudian Y taksiran tersebut ditempatkan sebagai regressor tambahan dalam model B. Maka modelnya menjadi : $Yt = b1 + b2 Z_2 + b3 Yt^A + \mu$
6. Menguji hipotesis bahwa $b3=0$, bila hipotesis ini tidak ditolak, kita memilih model B atas nodel A. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya maka kita memilih model A atas model B.

Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut :

HIPOTESIS: A3=0		
Hipotesis: b3=0	Diterima	Ditolak
Diterima	Menerima keduanya (A dan B)	Menerima B Menolak A
Ditolak	Menerima A Menolak B	Menolak keduanya (A dan B)

Dari tabel diatas menunjukkan kita tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas jika prosedur Davison-Mackinnon J test menerima dan menolak dari kedua model. Jika kedua model ditolak, tidak ada model yang membantu kita menjelaskan mengenai perilaku Y dan sebaliknya jika kedua model tersebut diterima, Kmenta (Jan Kmenta, 1986, hal.597) menyatakan "bahwa data tidak cukup banyak untuk membedakan antara kedua hipotesa (model)".

Kelemahan dari Davidson-Mackinnonn J test adalah ketika peneliti menggunakan t statistik untuk menguji signifikansi dari variabel dalam model, maka t statistik mempunyai standar distribusi normal hanya secara asimtotik dalam sampel besar. Maka jika Davidson-Mackinnon J test tidak terlalu kuat (*powerfull*) dalam sampel kecil.

2.2. JM test

Uji JM dilakukan dengan mengestimasi dua persamaan (Insukindro, 1990:257-258):

$$Y_t - Y_t^A = a_0 + a_1(Y_t^B - Y_t^A) + e$$

$$Y_t - Y_t^B = b_0 + b_1(Y_t^A - Y_t^B) + e$$

Dimana Y_t = variabel dependen
 Y_t^A = fitted value dari model A
 Y_t^B = fitted value dari model B

Pengujian dilakukan dengan mengestimasi kedua persamaan tersebut di atas dan melihat signifikansi dari koefisien a1 serta b1. Apabila koefisien a1 tidak berbeda dari nol secara signifikan maka model A mengungguli model B.

Analisis Hasil Regresi

Dengan menerapkan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk kedua model diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Untuk model inflasi Krishan G. Saini:

	C	GMT	GGNP	AGPM	ABMU
Koefisien	-0.6725665	0.0231857	0.4241104	0.3619577	0.0091875
Nilai Tstat	-0.3646789	0.3455277	4.3841611	2.1801814	0.2260505

$$F = 18,06201$$

$$R^2 = 0,750644$$

Pada uji orde kedua yang berkenaan dengan asumsi klasik meliputi non multikolinieritas, diketahui terjadi multikolinieritas tidak sempurna. Akan tetapi sesuai dengan kaidah Klein's rule of thumb dimana R^2 yang didapatkan dari auxiliary regression lebih kecil daripada R^2 secara keseluruhan maka bukan menjadi suatu masalah (bisa diabaikan). Pada asumsi

homokedastisitas, dengan melalui uji Glesjer, uji Park, uji ARCH, dan uji White asumsi ini terpenuhi. Sedangkan pada asumsi non otokorelasi dengan melihat nilai DW statistik sebesar 1,03619577 telah terjadi otokorelasi. Akan tetapi hal ini bisa ditanggulangi dengan cara metode Cochran Orcutt(dengan mentransformasi data ke dalam bentuk perbedaan pertama), dengan model penyesuaian parsial dan model autoregresif yang bisa dilihat dengan bergesernya nilai Durbin watsonnya.

Untuk model inflasi Vitaliano, didapat hasil sebagai berikut :

	C	GMT	GGDP	GGE	GPD
Koefisien	0,6409243	-0,0745109	0,4075227	0,1643779	0,0317949
Nilai Tstat	0,3150290	-0,0260442	3,9587986	2,2613023	0,3480194

$$F = 17,93038$$

$$R^2 = 0,749273$$

Pada uji orde kedua (second order test), untuk asumsi non multikolinieritas terjadi multikolinieritas tidak sempurna sehingga sesuai kaidah Klein's rule of thumb hal ini bisa diabaikan. Pada asumsi homokedastisitas, dari keempat uji yang dilakukan yaitu uji Glesjer, uji Park, uji ARCH dan uji White ternyata pada uji Glesjer dan uji ARCH diketahui mengandung heterokedastisitas. Akan tetapi hal ini bisa ditanggulangi dengan cara mentransformasi ke dalam bentuk logaritma. Sedangkan pada asumsi non otokorelasi dengan melihat nilai Durbin Watson statistiknya, uji LM dan uji (I) ternyata mengandung otokorelasi. Akan tetapi hal ini bisa ditanggulangi dengan metode Cochran-Orcutt, metode penyesuaian parsial dan metode autoregresif.

Analisis Pengujian Non Nested test

1. The Discrimination Approach

Pada pendekatan ini, untuk memilih dari kedua model yaitu model inflasi Krishan G. Saini dan model inflasi Vitaliano yang lebih bisa menerangkan perilaku inflasi di Indonesia berdasarkan diri pada kriteria goodness of fit. Dari hasil regresi yang telah dilakukan ternyata model inflasi krishan G. Saini memberikan hasil R^2 yang lebih tinggi yaitu 0,750644 (yang berarti 75% variabel bebas yang dipergunakan

mampu menjelaskan keragaman variabel laju inflasi di Indonesia) daripada model inflasi Vitaliano dengan R^2 sebesar 0,749273 (yang berarti "cuma" 74% variabel bebas yang dipergunakan yang mampu menjelaskan keragaman variabel laju inflasi di Indonesia).

Akan tetapi model ini mengandung kelemahan karena terlalu sederhana dimana hanya mendasarkan pada satu kriteria saja, sehingga jika satu model dianggap lebih baik dari model yang lain karena mempunyai nilai R^2 yang lebih tinggi, model ini harus tepat (fit) dengan data yang terbaik. Untuk itu akan dipergunakan juga metode yang lain yaitu The Discerning Approach untuk memilih model mana yang lebih baik.

2. The Discerning Approach

2.1. Davidson-Mackinnon J test.

Untuk menyeleksi kedua model yang ada dibuat model regresi dengan regressor tambahan I estimated dari model inflasi yang lain.

Pada model inflasi Krishan G. Saini dengan regressor tambahan I estimated dari model inflasi Vitaliano, terbentuk model sebagai berikut:

$$I^G = a_0 + a_1 GMT + a_2 GGNP + a_3 AGPM + a_4 ABMU + a_5 I^V + e$$

didapat hasil sebagai berikut:

	C	GMT	GGNP	AGPM	ABMU	I^V
Koefisien	-0,6716004	-0,0030917	0,2346149	0,1655712	0,0045820	0,5286965
Nilai Tstat	-0,3793959	-0,0467444	1,643	0,8489786	0,1171873	1,7467008

Dari hasil regresi di atas ternyata I^V signifikan pada derajat keyakinan 90% dengan nilai T-statistik sebesar 1,75. Hal ini berarti model inflasi Vitaliano dapat diterima sebagai model yang benar.

Kemudian, untuk model inflasi Vitaliano dengan regressor tambahan I estimated dari

model inflasi Krishan G. Saini terbentuk model sebagai berikut:

$$I^V = b_0 + b_1 GMT + b_2 GGDP + b_3 GGE + b_4 GPD + a_5 I^K + e$$

Di dapat hasil sebagai berikut:

	C	GMT	GGDP	GGE	GPD	I^K
Koefisien	0,3362177	-0,0550687	0,4329656	0,1496139	0,0061551	0,0005971
Nilai Tstat	0,1633968	-0,7322242	4,0815846	2,0164038	0,0648542	0,9961932

Dari hasil regresi diatas diketahui bahwa I^K tidak signifikan (asumsi $a_6=0$, diterima) maka dengan Davidson Mackinnon J test berarti model inflasi Vitaliano lebih bisa dipergunakan untuk menerangkan perilaku inflasi di Indonesia.

2.2. JM test.

Dengan menggunakan uji JM, maka persamaanya adalah sebagai berikut:

$$I - I^K = a_0 + a_1 (I^V - I^K) + e$$

$$I - I^V = b_0 + b_1 (I^K - I^V) + e$$

Dimana

I = laju inflasi.

I^K = fitted value dari model inflasi Krishan G. Saini.

I^V = fitted value dari model inflasi Vitaliano.

Setelah dilakukan regresi didapat hasil sebagai berikut:

	C	A1		C	B1
Koefisien	-0,1093679	-0,1457213	Koefisien	-0,1093679	-0,1457213
Nilai Tstat	0,9995116	1988,3738	Nilai Tstat	0,0004884	0,9715177

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode JM test dikarenakan koefisien a_1 berbeda dengan nol secara signifikan maka model inflasi dari Vitaliano lebih tepat untuk menerangkan perilaku inflasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak ahli ekonomi sepakat bahwa kebijaksanaan moneter dan fiskal mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi arus perekonomian. Kebijakan moneter akan bekerja melalui perusahaan-perusahaan di dalam komposisi aktiva dan pasiva keuangan masyarakat dan akan merubah permintaan barang dan jasa. Sebaliknya kebijaksanaan fiskal secara langsung akan mempengaruhi pengeluaran atau

pendapatan yang tersedia (disposable income). Kedua kebijaksanaan ini bekerja melalui saluran yang berlainan. Ini berarti keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap komposisi permintaan. Hal ini mengakibatkan perlunya koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan fiskal.

Beberapa kesimpulan yang dapat diutarakan disini adalah :

1. pengujian model inflasi yang dikembangkan oleh Donald Vitaliano (1984) selama 1955(1) – 1979(4) di Amerika Serikat dan model inflasi dari Krishan G. Saini yang pernah diterapkan di Philipina ternyata bisa dipergunakan untuk menerangkan perilaku inflasi di Indonesia. Pengujian

secara ekonometri menunjukkan bahwa penerapan kedua model tersebut dengan menggunakan data tahunan di Indonesia memenuhi asumsi klasik. Mungkin pada salah satu cara pengujian terdapat penyimpangan, akan tetapi hal tersebut bisa ditanggulangi/diobati. Maka uji statistik yang dilakukan dianggap valid dan koefisien yang diperoleh dapat dianalisis.

2. Pada model inflasi Saini dan model inflasi Vitaliano. Hasil pengujian secara serempak yaitu R^2 dan F test menunjukkan bahwa variabel bebas yang dipergunakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya (inflasi).
3. Perbandingan dari kedua model melalui uji non nested, diketahui bahwa dengan pendekatan diskriminasi (the discrimination approach), model inflasi Saini lebih bisa menerangkan perilaku inflasi di Indonesia. Akan tetapi dengan The Discerning Approach, model inflasi Vitaliano adalah yang lebih bisa menerangkan perilaku inflasi di Indonesia. Meskipun demikian, mengingat pendekatan The Discrimination Approach lebih sederhana dan hanya berdasarkan pada kriteria goodness of fit saja, maka penulis berkesimpulan bahwa model inflasi Vitaliano lebih bisa menerangkan perilaku inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena model inflasi Vitaliano menggunakan variabel-variabel yang lebih komplis dan lengkap dari instrumen kebijakan fiskal dan moneter.

SARAN

Analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi sangat diperlukan agar dapat diketahui bagaimana perilaku inflasi di Indonesia yang pada gilirannya akan memudahkan dalam menerapkan kebijakan pengendalian inflasi. Untuk itu dukungan adanya model inflasi yang tepat sangat diperlukan. Maka, penggunaan model inflasi untuk mengetahui perilaku inflasi di Indonesia dan

mengetahui variabel mana yang berpengaruh dominan untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan penanggulangan dan pengendalian inflasi, model inflasi Vitaliano lebih disarankan untuk dipergunakan daripada model inflasi Krishan G. Saini.

Dalam penanggulangan dan pengendalian inflasi diperlukan kombinasi antara kebijaksanaan fiskal dan moneter. Pada kebijaksanaan moneter, sasaran yang dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Instrumen lain yang dapat dipergunakan untuk mencegah inflasi adalah politik pasar terbuka (jual/beli surat berharga). Dengan cara menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

Pada kebijaksanaan fiskal yang menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah (government expenditure) serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Pengendalian inflasi juga dapat dilakukan dengan kebijaksanaan yang berkaitan dengan output, dimana kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung untuk menurunkan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, H.W., dan R.M. Sundrum, *Devaluation and Inflation*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol XX(1), 1984.
- Boediono, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, No. 5, Edisi III, BPFE, Yogyakarta, 1990.

- Denrburg, Thomas F., *Makro Ekonomi, Konsep, Teori dan Kebijakan*, Edisi VII, alih bahasa Karyaman Mochtar, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Glassburner, Bruce, dan Adityawan Chandra, *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Gunawan, Anton H., *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Gujarati, Damodar, *Basic Econometric*, Third Edition, Mc Graw Hill, 1995.
- Insukindro (1990a) "Model Koreksi Kesalahan untuk Permintaan Impor Bahan Bakar Minyak Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Tahun V, No.1, hal:39-51.
- _____ (1990b) "Komponen Regresi Jangka Panjang Model Ekonomi: Sebuah Studi Kasus Impor Barang di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Tahun V, No.5, hal:1-12.
- Insukendro, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1993
- Iswardono, S.P., *Survey Model-model Inflasi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 1, BPFE, Yogyakarta, 1988.
- Kamerschen, David R., *Money and Banking*, 8th Edition, South Western Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 1984.
- Kennedy, Peter, *A Guide To Econometrics*, The MIT Press, 1992.
- Koutsoyiannis, *Theory of Econometric: An Introductory Exposition of Econometric Methods*, Barnes and Noble, New York, 1973.
- Lerner, A.P., *The Inflationary Process*, Review of Economic and Statistic, August, 1959.
- Nasution, Anwar, *Aspek Ekonomi Anggaran Belanja Negara*, PRISMA, No. 5, Mei, 1984.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku II, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Nugroho, *Angka indeks Biaya Hidup, Ukuran Tingkat Inflasi*, Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol XXV(4), 1977.
- Sahu, Anandi P., James e. Payne & Robert T Kleiman, *Defense, Non Defense Expenditures and Inflation: an Empirical Analysis*, Quarterly Journal of Business and Economics, Vol 34, Winter, 1995.
- Saini, Krishan G., *The Monetarist Explanation of Inflation: The Experience of Six Asian Countries*, World Development, Vol. X, 1982
- Vieneris, Y.P., dan F.D. Sebold, *Macroeconomics Model and Policy*, John Wiley and Sons Inc., New York, 1977.
- Vitaliano, Donald F., *Defense spending and Inflation: An Empirical Analysis*, Quarterly Review of Economics and Business, Vol. 24, Spring, 1984.